

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
I		FUNGSI KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PEJABAT NEGARA		
1		FORMASI PEGAWAI a. Usulan dari Unit Kerja SKPD, disertai: 1) analisa jabatan 2) beban kerja b. Usulan Permintaan Formasi kepada Menpan dan RB dan Kepala BKN c. Persetujuan Menpan dan RB d. Penetapan Formasi ASN e. Penetapan Formasi Khusus	Biasa/Terbuka	Eselon IV
2		PENGADAAN PEGAWAI a. Proses Penerimaan Pegawai meliputi: 1) Pengumuman 2) Seleksi Administrasi 3) Pemanggilan Peserta Test 4) Pelaksanaan Ujian Tertulis 5) Keputusan Hasil Ujian 6) Wawancara b. Penetapan Pengumuman Kelulusan c. Berkas Lamaran yang tidak diterima d. Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP 1) Surat Lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan Kesehatan e. Nota Usul Pengangkatan CASN menjadi ASN lebih dari 2 tahun f. SK CASN/ASN Kolektif	Biasa/Terbuka	Eselon IV
			Biasa/Terbuka	Eselon IV
			Terbatas	Eselon III
			Terbatas	Eselon III
			Biasa/Terbuka	Eselon IV

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
3		PEMBINAAN KARIR PEGAWAI a. Diklat/Kursus/Magang/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Ijin Belajar 1) Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Ijin 2) Laporan Kegiatan Pengembangan Diri b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi PNS d. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit e. Disiplin Pegawai 1) Daftar Hadir 2) Rekapitulasi Daftar Hadir f. Berkas Hukuman Disiplin Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon IV
4		PENYELESAIAN PENGELOLAAN KEBERATAN PEGAWAI	Terbatas	Eselon III
5		MUTASI PEGAWAI a. Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Mutasi antar Unit b. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN c. Mutasi Keluarga 1) Surat Izin Pernikahan/Perceraian 2) Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian 3) Surat Nikah /Cerai 4) Akte Kelahiran Anak 5) Surat Keterangan Adopsi Anak 6) Surat Keterangan Meninggal Dunia	Terbatas Biasa/Terbuka Terbatas	Eselon III Eselon IV Eselon III

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	
1	2	3	4	5	
6		d. Usul kenaikan pangkat/golongan/jabatan	Terbatas	Eselon III	
		e. Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional	Terbatas	Eselon III	
		f. Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon III	
		g. Peninjauan Masa Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon IV	
		h. Berkas Baperjakat	Terbatas	Eselon III	
		ADMINISTRASI PEGAWAI			
		a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	
		b. Cuti Besar	Biasa/Terbuka	Eselon IV	
		c. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	
		d. Cuti Alasan Penting	Biasa/Terbuka	Eselon IV	
		e. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	
		f. Dokumentasi Identitas Pegawai	Terbatas	Eselon III	
		1) Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu			
		2) Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan			
3) Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)					
4) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
		g. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Eselon III
		h. Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala	Biasa/Terbuka	Eselon IV
7		KESEJAHTERAAN PEGAWAI		
		a. Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		b. Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/ASKES	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		c. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		d. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		e. Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		f. Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		g. Berkas tentang Pemberian Tali Kasih	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		h. Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		i. Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV
8		PEMBERHENTIAN PEGAWAI TANPA HAK PENSUN	Terbatas	Eselon III
9		PERSELISIHAN/SENGKETA KEPEGAWAIAN	Terbatas	Eselon III
10		USUL PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PENSUN PEGAWAI/JANDA/DUDA DAN ASN YANG MENINGGAL	Biasa/Terbuka	Eselon IV
11		BERKAS PERSEORANGAN APARATUR SIPIL NEGARA	Rahasia	Eselon III
		a. Berkas Lamaran yang diterima		
		b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya		
		c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN		
		d. SK Pengangkatan CASN		
		e. Hasil Pengujian Kesehatan		
		f. SK Pengangkatan ASN		
		g. SK Peninjauan Masa Kerja		
		h. SK Kenaikkan Pangkat		
		i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan		
		j. SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional		
		k. SK Perpindahan Wilayah Kerja		
		l. SK Perpindahan Antar Instansi		
		m. SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN)		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
		n. Berita Acara Pemeriksaan o. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin ASN p. SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk q. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan r. SK Pemberian Uang Tunggu s. SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara t. SK Pengalihan ASN u. SK Pemberhentian sebagai ASN v. SK Pemberhentian Sementara w. Surat Keterangan Pernyataan Hilang x. Surat Keterangan Kembalinya ASN yang dinyatakan hilang y. SK Penggantian Nama z. Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran aa. Akta Nikah/Cerai bb. Akta Kelahiran cc. Isian Formulir PUASN dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ASN dan Jabatan ee. Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia/hilang hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus kk. Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala ll. Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri mm. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri nn. Kartu Daftar Ulang (Kardaf) ASN oo. Ijazah/Sertifikat pp. SK Penempatan/Penarikan Pegawai qq. SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk rr. Surat Pertimbangan Status ASN ss. SK Pengaktifan Kembali Sebagai ASN tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah uu. SK Pensiun		
12		BERKAS PERSEORANGAN PEJABAT NEGARA	Rahasia	Eselon II
13		BERKAS PERSEORANGAN PEJABAT LAINNYA a. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD b. Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPUD, dan Bawaslu c. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Lainnya	Rahasia	Eselon II
14		BERKAS PERSEORANGAN KEPALA SKPD	Rahasia	Eselon II
II		FUNGSI KEUANGAN A RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P) 1. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) a. Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas - Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah - Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> b. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah c. KUA beserta Nota Kesepakatannya d. Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) e. Nota Kesepakatan PPA f. Prioritas Plafon Anggaran 		
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui b. Dokumen RKA-SKPD 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<ul style="list-style-type: none"> 3. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) <ul style="list-style-type: none"> a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan <ul style="list-style-type: none"> - Nota Keuangan Pemerintah - Materi RAPBD b. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah c. Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang RaPerda APBD d. Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannya e. Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD beserta penjabarannya f. Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD g. Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta penjabarannya h. Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<ul style="list-style-type: none"> 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan <ul style="list-style-type: none"> 1 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2 Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) 3 Dokumen evaluasi pelaksanaan RKPD 4 Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah dibahas bersama antara DPRD dan 5 Prioritas Plafon Anggaran Perubahan b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan <ul style="list-style-type: none"> Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah <ul style="list-style-type: none"> 1 Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan: <ul style="list-style-type: none"> Nota Keuangan Pemerintah Materi RAPBD 2 Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 3 Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang RaPerda APBD Perubahan 4) Dokumen Rancangan Penjabaran APBD Perubahan beserta 5 Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD Perubahan beserta penjabarannya 6 Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD Perubahan 7 Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Gubernur beserta 8 Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Perubahan 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<ul style="list-style-type: none"> 5 Draf Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten (Renja) dan draf Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta RKA murni dan perubahan sebelum disahkan 	Terbatas	Eselon IV
		<ul style="list-style-type: none"> 6 <i>Exercise</i>/perhitungan dan Rancangan APBD Perubahan Pemerintah Provinsi (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD) 	Terbatas	Eselon IV
		<ul style="list-style-type: none"> 7 <i>Exercise</i>/perhitungan dan Rancangan APBD Perubahan Pemerintah Provinsi (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD) 	Terbatas	Eselon IV
		<ul style="list-style-type: none"> 8 Rancangan KUA 	Terbatas	Eselon IV

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
		9 Rancangan PPAS	Terbatas	Eselon IV
		10 Rancangan PPAS Perubahan	Terbatas	Eselon IV
		11 Rancangan KUPA	Terbatas	Eselon IV
		12 DPA-SKPD Provinsi Kalimantan Selatan	Terbatas	Eselon IV
		13 DPPA-SKPD Provinsi Kalimantan Selatan	Terbatas	Eselon IV
		14 Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah dan besaran uang yang dihibahkan atas beban APBD	Terbatas	Eselon IV
		15 DPA PPKD	Terbatas	Eselon IV
		B PENYUSUNAN ANGGARAN		
		1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah	Terbatas	Eselon III
		4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		5 Data penerimaan APBD yang dikelola Bendaharawan Umum Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		C PELAKSANAAN ANGGARAN		
		1. Surat Penyedia Dana (SPP, SPM, dan Sp2D) : UP, GU, TU, LS	Terbatas	Eselon III
		2 Pendapatan		
		a. Pendapatan Asli Daerah		
		1 Surat Ketetapan Pajak Daerah		
		2 Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah antara lain :		
		-Pajak Hotel		
		-Pajak Restoran		
		-Pajak Hiburan		
		-Pajak Reklame		
		-Pajak Penerangan Jalan		
		-Pajak Mineral Bukan Logam Bantuan		
		-Pajak Parkir		
		-Pajak Air Tanah		
		-Pajak Sarang Burung Walet		
		-PBB Sektor Perdesaan dan perkotaan		
		-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB)		
		3 Surat Ketetapan Retribusi Daerah		
		4 Bukti Penarikan Retribusi, antara lain :		
		a) Retribusi Jasa Umum		
		-Retribusi Pelayanan Kesehatan		
		-Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		
		-Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil		
		-Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat		
		-Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		
		-Retribusi Pelayanan Pasar		
		-Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> - Buku Kas Pembantu (BKP) - Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek - Rekening Koran Bank - Laporan Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi - Bukti penyetoran Pajak - Register Penutupan Kas - Berita Acara Pemeriksaan - Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan Termasuk Arsip Data Komputer (ADK) - Laporan Pendapatan Negara - Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Tiwulan/Semesteran - Bukti Kas Pengeluaran berikut lampirannya 		
		7 Daftar Gaji	Rahasia	Eselon IV
		8 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	Terbatas	Eselon III
		9 Pertanggungjawaban APBD <ul style="list-style-type: none"> - Materi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah - Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Pemerintah - Pemandangan umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD oleh DPRD - Jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggung jawaban APBD - Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD terhadap Raperda Pertanggung jawaban APBD - Permohonan Evaluasi Gubernur tentang Raperda dan Raperbup Pertanggung jawaban APBD - Evaluasi Gubernur tentang Raperda Pertanggungjawaban dan Raperbup APBD - Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD 	Terbatas	Eselon III
		10 Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Neraca - Laporan Perubahan Saldo Lebih - Laporan Operasional - Laporan Arus Kas - Laporan perubahan Ekuitas - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 	Terbatas	Eselon III
		11 Data Belanja Bendaharawan Umum Daerah baik berupa belanja pegawai dan belanja lainnya	Terbatas	Eselon III
		12 Sgi Penguji SP2D yang disampaikan ke Bank Kalsel untuk pencairan dana	Terbatas	Eselon III
		13 Dokumen rekonsiliasi dan verifikasi laporan keuangan atas investasi daerah, investasi permanen dan Non permanen	Terbatas	Eselon III
		14 Dokumen keuangan penyusunan pertanggungjawaban dana transfer Pemerintah Pusat	Terbatas	Eselon III

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
		15 Laporan Keuangan Pemerintah yang belum diaudit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal	Terbatas	Eselon III
		D PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI		
		1. Dokumen Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)	Terbatas	Eselon III
		2. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Green Book</i>)	Terbatas	Eselon III
		3. Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan dokumen sejenisnya	Terbatas	Eselon III
		4. Dokumen <i>Loan Agreement</i> (PHLN) seperti : <i>Draft Agreement, Legal Opinion</i> , Surat menyurat dengan <i>Lender</i>	Terbatas	Eselon III
		5. Dokumen Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l. : Usulan Luncuran Dana	Terbatas	Eselon III
		6. Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya : - <i>Reimbursement</i> - <i>Direct Payment/Transfer Procedure</i> - <i>Special Commitment/ L/C Opening</i> - <i>Special Account/Imprest Fund</i>	Terbatas	Eselon III
		7. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)	Terbatas	Eselon III
		8. Dokumen Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya	Terbatas	Eselon III
		9. <i>Replenishment</i> (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)	Terbatas	Eselon III
		10 <i>Staff Appraisal Report</i>	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		11. <i>Report</i> /Laporan yang terdiri dari: - <i>Progress Report</i> - <i>Monthly Report</i> - <i>Quarterly Report</i>	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		12. Laporan Hutang Daerah : - Laporan Pembayaran Hutang Daerah - Laporan Posisi Hutang Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		13. <i>Completion Report/Annual Report</i>	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		14. Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
		<p>E PENGELOLAAN APBD/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)</p> <p>1. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran - Pejabat Pembuat Komitmen - Kuasa Pengguna Barang/Jasa - Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah - Pejabat Penandatanganan SPM - Bendahara Penerimaan/Pengeluaran 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<p>F SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD)</p> <p>1. Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<p>2. Dokumen Kebijakan Akuntansi</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<p>3. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi</p>	Terbatas	Eselon III
		<p>4. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran</p>	Terbatas	Eselon III
		<p>5. Laporan Pajak Pribadi (LP2P)</p>	Terbatas	Eselon III
		<p>G PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN</p> <p>1. Surat Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara atas Pengguna Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Spesimen Tanda Tangan</p>	Terbatas	Eselon III
		<p>2. Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPP-LS, SPP-GU, SP3, Daftar Perincian Penggunaan Dana, SPPR-LS, SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, Bilyet Giro, SPM Nihil - Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta bukti Pendukungnya al : Copy Faktur Pajak dan Nota - Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 	Terbatas	Eselon III
		<p>3. Buku Rekening Bank</p>	Terbatas	Eselon III
		<p>4. Keputusan Pembukuan Rekening</p>	Terbatas	Eselon III
		<p>5. Pembukuan anggaran terdiri dari :</p> <p>Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan Daftar Pembukuan Pencarian/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencarian (DHP) dan Rekening Koran</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<p>H PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN</p>		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
		1. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		2. Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPhn, Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan, dll	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		I PENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA DAN BIAYA BANTUAN PEMILU DARI APBD		
		1. Dokumen Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan PEMILU dari APBD	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		a. Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu		
		b. Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan		
		c. Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD, PPK, PPS, KPPS dan Panwasda, Permohonan Pengajuan		
		d. Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu		
		e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota		
		f. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD		
		g. Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada		
		h. Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD		
		i. Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD		
		J PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU		
		1. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		2. Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu	Terbatas	Eselon III
		3. Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, Bunga, Jasa Giro	Terbatas	Eselon III
		4. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	Terbatas	Eselon III
		5. Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		K. PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU		
		1. Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu dan PPKO Provinsi termasuk	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		2. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	Terbatas	Eselon III
		3. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank dan lain-lain	Terbatas	Eselon III

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
III		L PEMERIKSAAN/PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH		
		1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	Terbatas	Eselon III
		2. Pelaksanaan Pengawasan		
		a Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Eselon III
		b Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)	Terbatas	Eselon III
		Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut		
		c Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	Terbatas	Eselon III
		d Laporan Perkembangan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)	Terbatas	Eselon III
		e Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Pemerintah Daerah	Terbatas	Eselon III
		f Good Corporate Governance (GCG)	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		3. Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah:	Terbatas	Eselon III
		a Tuntutan Perbendaharaan		
		b Tuntutan Ganti rugi		
		FUNGSI NON KEUANGAN NON KEPEGAWAIAN		
A PERENCANAAN				
1. Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang /Master Plan (RPJP)	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
c. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
d. Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS)	Terbatas	Eselon III		
2 Program Kerja Tahunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
a. Usulan Unit Kerja beserta data pendukung				
b. Program Kerja Tahunan Unit Kerja				
c. Program Kerja Tahunan				
3. Penetapan / Kontrak Kinerja	Terbatas	Eselon III		
a. Pimpinan Unit Kerja				
b. Kepala SKPD				
4 Laporan	Biasa / Terbatas	Eselon IV		
a. Laporan Berkala				
Laporan Harian				
Laporan Mingguan				

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
		a. Surat Perintah Kepala Arsip Nasional Republik b. Surat Perintah Pejabat setingkat eselon I dan II 7. Standar / Pedoman / Prosedur Kerja / Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis yang bersifat nasional / regional / internasional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir 8. Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding(MoU)/ Kontrak/Perjanjian Kerjasama : a. Dalam Negeri b. Luar Negeri 9. Dokumentasi Hukum Undang-Undang,Peraturan Pemerintah,Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan yang dijadikan referensi 10. Sosialisasi / Penyuluhan / Pembinaan Hukum 11. Bantuan / Konsultasi Hukum /Advokasi Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama) 12. Kasus / Sengketa Hukum a. Pidana Berkas tentang kasus/sengketa pidana,baik kejahatan maupun pelanggaran : - Proses verbal mulai dari penyelidikan,penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum b. Perdata Berkas tentang kasus/sengketa perdata : c. Tata Usaha Negara - Proses verbal mulai dari penyelidikan,penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum - Berkas perkara PTUN sebelum disampaikan ke persidangan d. Perburuhan Berkas tentang kasus/sengketa Perburuhan : - Proses verbal mulai dari penyelidikan,penyidikan sampai vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum e. Arbitrase Berkas tentang kasus/sengketa Perburuhan : - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembelaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum f. Sengketa adat g. Kasus-kasus yang berkaitan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) h. Anak kasus pelecehan seksual/kekerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban 13. Perizinan 14. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) a. Hak Cipta b. Hak Paten Paten Biasa Paten Sederhana	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> c. Hak desain Industri d. Hak Rahasia Dagang e. Hak Merk f. DTLS (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) 		
		<ul style="list-style-type: none"> 15. Permohonan Haki yang ditolak (Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merk, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		C ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN		
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan b. Perubahan c. Pembubaran 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Uraian Jabatan dan Tata Kerja 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<ul style="list-style-type: none"> 3. Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<ul style="list-style-type: none"> 4. Evaluasi Kelembagaan 	Terbatas	Eselon III
		D KEARSIPAN		
		<ul style="list-style-type: none"> 1 Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan tentang pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<ul style="list-style-type: none"> 2 Pembinaan kearsipan <ul style="list-style-type: none"> A) Bina Arsiparis <ul style="list-style-type: none"> 1) Bimbingan konsultasi arsiparis 2) Penilaian Arsiparis 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<ul style="list-style-type: none"> 3) Pemilihan arsiparis teladan <ul style="list-style-type: none"> a) Penyelenggaraan b) Berkas penetapan arsiparis teladan 4) Database arsiparis 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<ul style="list-style-type: none"> B) Bimbingan dan Konsultasi (Sosialisasi, Seminar, Lokakarya, Workshop) <ul style="list-style-type: none"> 1) Penerapan sistem dalam penyelenggaraan kearsipan 2) Penggunaan sarana dan prasarana kearsipan 3) Unit kearsipan 4) Sumber daya Manusia 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<ul style="list-style-type: none"> C) Supervisi dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan 2) Pelaksanaan 3) Laporan hasil supervisi 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<ul style="list-style-type: none"> D) Data Base Bimbingan, Konsultasi dan Supervisi 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<ul style="list-style-type: none"> E) Fasilitasi Kearsipan <ul style="list-style-type: none"> 1) SDM kearsipan 2) Prasarana dan sarana 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<ul style="list-style-type: none"> F) Unit Kearsipan Teladan <ul style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggaraan 	Biasa/Terbuka	Eselon IV

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
		2) Berkas penetapan Unit kearsipan teladan G) Jadwal Retensi Arsip H) Tata Naskah Dinas (TND) I) Klasifikasi arsip J) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (KKAAD)	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV
		3 Pengelolaan Arsip A) Pengelolaan arsip Dinamis 1) Penciptaan a) Pencatatan - Buku agenda - Kartu kendali - Lembar pengantar / buku ekspedisi.	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		2) Penggunaan a) Pengklasifikasian Pengamanan dan akses arsip b) Peminjaman	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		3) Pemeliharaan a) Pemberkasan - daftar arsip Aktif	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		b) Penataan Arsip inaktif - Pengaturan fisik - Pengolahan informasi arsip - Penyusunan daftar arsip inaktif	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		c) Penyimpanan Arsip - Skema penyimpanan arsip aktif dan inaktif - Peta lokai penyimpanan arsip - pengamanan	Terbatas	Eselon III
		d) Alih Media - Kebijakan alih alih media - Autentikasi - Berita acara - Daftar arsip yang alihmediakan	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		e) Program arsip vital	Terbatas	Eselon III
		4) Autentikasi Arsip Dinamis a) Pembuktian autensitas b) Pendapat tenaga ahli c) Pengujian d) Penetapan autensitas arsip statis/surat pernyataan penciptaan arsip	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		5) Penyusutan a) Pemindahan Arsip inaktif - berita acara pemindahan - daftar arsip yang dipindahkan b) Pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna - penilaian panitia penilai - permintaan persetujuan (kepala ANRI, Kepala lembaga kearsipan) - penetapan arsip yang dimusnahkan - berita acara pemusnahan - daftar arsip yang dimusnahkan c) Penyerahan arsip Statis - pembentukan panitia penilai - notulen rapat penilai - surat pertimbangan panitia penilai - surat persetujuan dari kepala LKD - surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh dan dapat	Terbatas	Eselon III
		dipergunakan - keputusan penetapan penyerahan - berita acara penyerahan arsip		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> - daftar arsip yang diserahkan 6) Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis <ul style="list-style-type: none"> a) Database pengolahan arsip aktif b) Database pengolahan arsip inaktif c) Database arsip Statis B) Pengelolaan Arsip Statis <ul style="list-style-type: none"> 1) Akuisisi <ul style="list-style-type: none"> a) Monitoring fisik dan dan daftar b) Verifikasi terhadap daftar arsip c) Menetapkan status arsip statis d) persetujuan untuk penyerahan e) penetapan arsip yang diserahkan f) berita acara penyerahan arsip g) daftar arsip yang diserahkan 2) Sejarah Lisan <ul style="list-style-type: none"> a) administrasi pelaksanaan sejarah lisan b) Hasil wawancara sejarah lisan <ul style="list-style-type: none"> - berita acara wawancara sejarah lisan - laporan kegiatan - hasil wawancara (kaset / CD) dan transkrip 3) Daftar Pencarian Arsip Statis <ul style="list-style-type: none"> a) pengumuman b) akuisisi daftar pencairan arsip statis 4) Penghargaan dan imbalan 5) Pengolahan <ul style="list-style-type: none"> a) Menata informasi b) Menata fisik c) menyusun sarana bantu temu balik <ul style="list-style-type: none"> - Guide - Daftar arsip statis - inventaris arsip statis 6) Preserfasi <ul style="list-style-type: none"> a) Preventif <ul style="list-style-type: none"> - Penyimpanan - pengendalian hama terpadu - Reproduksi (ahli media) <ul style="list-style-type: none"> * Berita acara alih media * Daftar arsip yang dialihmediakan - perencanaan penanggulangan bencana b) Kuratif <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan arsip 7) a) Pembuktian autensitas <ul style="list-style-type: none"> b) Pendapat tenaga ahli c) Pengujian d) Penetapan autensitas arsip statis/surat pernyataan 8) Akses Arsip Statis <ul style="list-style-type: none"> a) Layanan arsip b) Penerbitan naskah sumber <ul style="list-style-type: none"> - Administrasidan proses penyusunan - Hasil naskah sumber arsip c) Pameran arsip 9) Jasa Kearsipan <ul style="list-style-type: none"> a) Konsultasi kearsipan b) Manual kearsipan c) Penata arsip d) Otomasi kearsipan e) Penyimpanan arsip f) Perawatan dan pemeliharaan arsip g) Database jasa kearsipan 	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon III</p> <p>Eselon IV</p>
		E KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN		

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
		1. Telekomunikasi : Administrasi penggunaan / langganan peralatan telekomunikasi meliputi : telepon,radio,teleks,TV kabel dan internet 2. Perjalanan Dinas a. Dalam Negeri b. Luar Negeri 3. Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan 4. Risalah/Notulen Rapat a. Rapat staf b. Rapat pimpinan 5. Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi 6. Pengurusan kendaraan dinas: a. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas b. Pemeliharaan dan perbaikan c. Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan 7. Pemeliharaan gedung dan taman : a. Pertamanan /landscaping b. Penghijauan c. Perbaikan gedung d. Perbaikan rumah dinas /wisma e. Kebersihan gedung dan taman 8. Pengelolaan jaringan listrik, air, telepon, dan komputer : a. Perbaikan /pemeliharaan b. Pemasangan 9. Ketertiban dan keamanan a. Pengamanan,penjagaan,dan pengawalan terhadap pejabat, kantor, dan rumah dinas : 1). Daftar nama satuan pengamanan 2). Daftar jaga / daftar piket 3). Catatan gangguan / pelanggaran /kejadian 4). Surat ijin keluar masuk orang atau barang b. Laporan ketertiban dan keamanan 1). Kehilangan 2). Kerusakan 3). Kecelakaan 4). Gangguan 10. Administrasi pengelolaan parkir 11. Administrasi pakaian dinas pegawai,satpam,petugas kebersihan dan pegawai lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		F HUBUNGAN MASYARAKAT		
		1. Keprotokolan : a. Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar) b. Buku tamu c. Agenda kegiatan pimpinan lembaga/instansi d. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV
			Biasa/Terbuka	Eselon IV
			Biasa/Terbuka	Eselon IV
			Biasa/Terbuka	Eselon IV
			Biasa/Terbuka	Eselon IV
			Biasa/Terbuka	Eselon IV
			Biasa/Terbuka	Eselon IV
			Biasa/Terbuka	Eselon IV
			Biasa/Terbuka	Eselon IV
			Biasa/Terbuka	Eselon IV
			Biasa/Terbuka	Eselon IV
			Terbatas	Eselon III
			Biasa/Terbuka	Eselon IV

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur / petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan / survey - Analisis / pengolahan data d Hasil penelitian / pengkajian / rekomendasi <ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi e Hasil penelitian dan pengkajian hasil jasa layanan 		
		<p>3 Pengembangan dan Inovasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana Kerja - Administrasi pengembangan dan inovasi - Pelaksanaan - Hasil pengembangan / inovasi 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<p>4 Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replika/prototipe hasil penelitian/pengkajian/perekayasaan/pengembangan/inovasi :</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<p>5 Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<p>6 Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> a Promosi b Masyarakat 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<p>7 Pembinaan penelitian/pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<p>8 Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<p>9 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<p>10 Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan: jurnal / buletin ilmiah, bahan publikasi khusus b. Leaflet dan booklet c. Kamus istilah 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<p>11 Hak atas kekayaan intelektual (HAKI)</p>	Terbatas	Eselon III
		<p>12 Forum Komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<p>13 Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jasa laboratorium pengujian b. Jasa teknologi produksi c. Jasa studi d. Jasa penyewaan peralatan e. Jasa perbantuan tenaga ahli / profesi f. Jasa sertifikasi / kalibrasi dan sertifikasi g. Buku rekaman barang yang diuji / dikalibrasi 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		<p>14 Sertifikasi personil peneliti</p>	Terbatas	Eselon III

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
		15 Akreditasi laboratorium	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		H PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
		1. Pedoman-pedoman kediklatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		2. Kurikulum-kurikulum diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		3. Modul-modul diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		4. Panduan fasilitator	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		5. Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		6. Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		7. Akreditasi Lembaga Diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		- Surat permohonan akreditasi		
		- Laporan hasil verifikasi lapangan		
		- Berita acara rapat verifikasi		
		- Berita acara rapat tim penilai		
		- Surat keputusan penetapan akreditasi		
		- Sertifikasi akreditasi		
		- Laporan akreditasi lembaga diklat		
		8. Sertifikasi sumber daya manusia kediklatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		- Surat permohonan sertifikasi		
		- Laporan hasil verifikasi lapangan		
		- Berita acara rapat verifikasi		
		- Berita acara rapat Tim penilai		
		- Surat keputusan penetapan sertifikasi		
		- Sertifikat sertifikasi		
		- Laporan sertifikasi individual		
		9. Sistem informasi diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		- Data lembaga diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		- Data prasarana diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		- Data sarana Diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		- Data pengelola diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		- Data penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		- Data widyaiswara	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		- Data program diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		- Data peserta diklat	Terbatas	Eselon III
		10. Registrasi sertifikat STTPL peserta diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		a. Surat permohonan kode registrasi		
		b. Buku registrasi		
		c. Surat penyampaian kode registrasi		
		11. Rencana tahunan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		12. Rencana penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
		13. Penyelenggaraan diklat <ul style="list-style-type: none"> - Surat pemanggilan peserta - Surat keputusan tim penyelenggaraan diklat - Surat keputusan tim pengajar diklat - Panduan diklat - Laporan panitia penyelenggaraan diklat - Sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat - Daftar peserta diklat - Bahan ajar diklat - Daftar hadir peserta diklat - Daftar hadir widyaiswara - Formulir evaluasi diklat - Formulir evaluasi widyaiswara - Hasil formulasi evaluasi peserta diklat - Sertifikat/ STTPL - Sambutan penutupan diklat 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		14. Laporan penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		15. Saran/Rekomendasi penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		16. Evaluasi penyelenggaraan diklat	Terbatas	Eselon III
		17. Evaluasi alumni pasca diklat	Terbatas	Eselon III
		I KEPUSTAKAAN		
		1. Deposit Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		a. Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam b. Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman c. Terbitan Internasional dan Regional d. Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam e. Bibliografi dan Katalog f. - Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) - Bibliografi Daerah (BD) - Katalog Induk Nasional (KIN) Katalog Induk Daerah (KID) Katalog Dalam Terbitan (KDT) g. Pendaftaran Nomor <i>Internasional Standard Book Number</i> (ISBN) h. Pendaftaran Nomor <i>Internasional Standard Music Number</i> (ISMN)		
		2. Pengembangan Koleksi		
		a. Akusisi		
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembelian - Hibah - Hadiah - Tukar Menukar - Implementasi Undang-Undang KCKR - Terbitan Internal - Pendistribusian bahan pustaka surplus - Inventarisasi koleksi (Buku Induk) - Dokumen pengadaan bahan pustaka sebelum proses lelang 	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III
		b. Pengolahan Bahan Pustaka	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		c. Pangkalan Data Katalog Koleksi	Biasa/Terbuka	Eselon IV

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
		3. Jasa Perpustakaan dan Informasi <ul style="list-style-type: none"> a. Keanggotaan b. Sirkulasi c. Referensi d. Alih Aksara, Alih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara e. Kerjama Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> - MoU - Perjanjian kerjasama - Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional f. Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan situs web - Pengembangan kemas ulang informasi multimedia - Pengembangan program aplikasi perpustakaan - Pengembangan pangkalan data perpustakaan digital g. Pangkalan Data Layanan Perpustakaan 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		4. Preservasi Bahan Pustaka <ul style="list-style-type: none"> a. Konservasi <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan Bahan Perpustakaan - Perbaikan Bahan Perpustakaan - Penjilidan Bahan Perpustakaan b. Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto) c. Transformasi Digital d. Kurasi Digital 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		5. Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> - Perpustakaan Umum - Perpustakaan Khusus - Perpustakaan Sekolah - Perpustakaan Perguruan Tinggi b. Akreditasi Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> - Permintaan akreditasi - Pemberian akreditasi - Pangkalan data perpustakaan yang diakreditasi c. Pangkalan Data Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Pokok Perpustakaan - Perpustakaan Berbasis Wilayah d. Masyarakat Minat Baca <ul style="list-style-type: none"> Organisasi Perpustakaan <ul style="list-style-type: none"> - Forum Perpustakaan Umum - Forum Perpustakaan Khusus - Forum Perpustakaan Sekolah - Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi - Gerakan Masyarakat Minat Baca - Organisasi Perpustakaan Lainnya 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		6. Pengembangan Pustakawan <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikasi Tenaga Perpustakaan b. Pembinaan Tenaga Perpustakaan c. Penerbitan Jurnal d. Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan <ul style="list-style-type: none"> - Tim Penilai Pusat - Tim Penilai Unit Kerja - Tim Penilai Instansi - Tim Penilai Provinsi e. Masyarakat f. Evaluasi Tenaga Perpustakaan g. Pangkalan data Tenaga Perpustakaan h. Pangkalan data Tim Penilai Pustakawan 	Biasa/Terbuka	Eselon IV
		J TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
		1. Kebijakan <p>Kebijakan sumber daya dan perangkatan Pos dan Informatika, penyelenggaraan Pos dan Informatika</p>	Biasa/Terbuka	Eselon IV

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> A) Standarisasi perangkat Pos dan Informatika <ul style="list-style-type: none"> 1) Teknik Pos dan Telekomunikasi 2) Teknik komunikasi radio 3) Penerapan standar Pos dan Telekomunikasi 4) Kualitas pelayanan dan harmonisasi standar 5) Standar dan audit perangkat lunak 2. Sumber Daya Dan Perangkat <ul style="list-style-type: none"> A) Penataan Sumber Daya <ul style="list-style-type: none"> 1) Alokasi spektrum dinas <ul style="list-style-type: none"> a) Alokasi dinas tetap b) Alokasi dinas bergerak darat 2) Alokasi spektrum Non dinas tetap dan bergerak darat <ul style="list-style-type: none"> a) Alokasi dinas penyiaran b) Alokasi dinas penerbangan, maritim dan satelit 3) Orbit satelit <ul style="list-style-type: none"> a) Notifikasi dan penataan Filinf Satelit b) Tata kelola hubungan antar penyelenggara 4) Ekonomi sumber daya <ul style="list-style-type: none"> a) Analisa industri dan ekonomi b) Penanganan izin pria 5) Harmonisasi teknik spektrum <ul style="list-style-type: none"> a) Teknik spektrum antar lembaga b) Harmonisasi dan notifikasi terestrial B) Operasi Sumber Daya <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan spektrum dinas <ul style="list-style-type: none"> a) Pelayanan dinas tetap b) Pelayanan dinas bergerak darat 2) Pelayanan spektrum Non Dinas <ul style="list-style-type: none"> a) Pelayanan dinas penyiaran b) Pelayanan dinas penerbangan, maritim dan satelit 3) Sertifikasi operator radio <ul style="list-style-type: none"> a) Pelayanan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk b) Pelayanan operator radio 4) Penanganan biaya <ul style="list-style-type: none"> a) Penanganan piutang biaya hak penggunaan frekuensi b) Analisa dan evaluasi biaya hak penggunaan frekuensi 5) Konsultasi dan data operasi sumber daya <ul style="list-style-type: none"> a) Konsultasi dan informasi sumber daya b) Pengelolaan data operasi sumber daya C) Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan sistem monitoring spektrum <ul style="list-style-type: none"> a) Rancang bangun teknologi monitoring spektrum b) Pemeliharaan sistem informasi monitoring spektrum 2) Pengelolaan sistem informasi manajemen spektrum <ul style="list-style-type: none"> a) Rancang bangun sistem informasi manajemen spektrum b) Pemeliharaan sistem informasi manajemen spektrum 3) Monitoring dan Penertiban Spektrum <ul style="list-style-type: none"> a) Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Bergerak b) Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Non Bergerak 4) Monitoring dan Penertiban <ul style="list-style-type: none"> a) Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika b) Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika 3. Penyelenggaraan Pos Dan Informatika <ul style="list-style-type: none"> A) Pos <ul style="list-style-type: none"> 1) Layanan dan Penerapan Pos Universal <ul style="list-style-type: none"> a) Layanan b) Penerapan Layanan 2) Layanan Pos Komersial <ul style="list-style-type: none"> a) Tata Kelola Layanan b) Data dan Informasi Layanan 3) Prangko dan Filateli <ul style="list-style-type: none"> a) Prangko b) Filateli 4) Iklim Usaha Pos 	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> a) Pos Universal b) Pos Komersial 5) Pentarifan Pos <ul style="list-style-type: none"> a) Layanan Pos Universal a) Pos Komersial B) Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Layanan Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> a) Akses b) Backbone 2) Layanan Jasa Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> a) Jasa Teleponi Dasar, Nilai Tambah Teleponi, Sistem dan Transaksi Elektronik b) Jasa Multimedia 3) Penomoran telekomunikasi dan informatika <ul style="list-style-type: none"> a) Penomoran Telekomunikasi b) Penomoran Informatika 4) Tarif dan interkoneksi <ul style="list-style-type: none"> a) Tarif telekomunikasi b) Interkoneksi telekomunikasi 5) Kelayakan sistem telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> a) Pelayanan sistem jaringan dan jasa b) Penerapan teknologi telekpmunikasi 	Biasa/Terbuka	Eselon IV

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> B) e-Busines <ul style="list-style-type: none"> 1) Tata kelola e-Busines <ul style="list-style-type: none"> a) Program e-Busines b) Evaluasi e-Busines 2) Teknologi dan infrastruktur e-Busines <ul style="list-style-type: none"> a) Teknologi e-Busines b) Infrastruktur e-Busines 3) Interoperabilitas dan interkoneksi e-Busines <ul style="list-style-type: none"> a) Interoperabilitas e-Busines b) Interkoneksi e-Busines 4) Aplikasi layanan e-Busines <ul style="list-style-type: none"> a) Bidang usaha dan mikro b) Bidang usaha menengah dan besar C) Pemberdayaan Informatika <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan <ul style="list-style-type: none"> a) Perancangan model b) Penerapan model 2) Pemberdayaan informatika masyarakat pedesaan <ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan model b) Penerapan model 3) Pemberdayaan informatika masyarakat perbatasan dan <ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan model b) Penerapan model 4) Pemberdayaan informatika masyarakat khusus <ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan model b) Penerapan model D) Pemberdayaa Industri Informatika <ul style="list-style-type: none"> 1) Industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika <ul style="list-style-type: none"> a) Pemberdayaan b) Promosi 2) Industri perangkat informatika pengguna <ul style="list-style-type: none"> a) Pemberdayaan b) Pengembangan produk 3) Industri perangkat lunak <ul style="list-style-type: none"> a) Pemberdayaan b) Pengembangan produk 4) Industri konten multimedia <ul style="list-style-type: none"> a) Pemberdayaan b) Pengembangan produk E) Keamanan Informasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Tatakelola keamanan informasi <ul style="list-style-type: none"> a) Kelembagaan b) Manajemen risiko 2) Teknologi keamanan informasi <ul style="list-style-type: none"> a) Infra Struktur b) Aplikasi 3) Monitoring evaluasi dan tanggapan darurat keamanan <ul style="list-style-type: none"> a) Infra Struktur b) Aplikasi 4) Penyelidikan dan penindakan <ul style="list-style-type: none"> a) Monitoring dan evaluasi keamanan informasi b) Tanggap darurat peristiwa keamanan informasi 5) Budaya keamanan informasi <ul style="list-style-type: none"> a) Penyidikan b) Penindakan 	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Terbatas</p>	<p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon IV</p> <p>Eselon III</p>
		<ul style="list-style-type: none"> 5. Informasi Dan Komunikasi Publik <ul style="list-style-type: none"> A) Komunikasi Publik <ul style="list-style-type: none"> 1) Komunikasi publik <ul style="list-style-type: none"> a) Program komunikasi publik b) Monitoring dan evaluasi 2) Pengelolaan opini publik <ul style="list-style-type: none"> a) Pengumpulan opini publik b) Pengolahan opini publik 3) Layanan komunikasi publik 	<p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon IV</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
1	2	3	4	5
		a) Pengumpulan data b) Pengolahan data B) Pengolahan dan Penyediaan Informasi 1) Informasi layanan hukum dan keamanan a) Politik dan keamanan b) Hukum dan hak asasi manusia	Biasa/Terbuka	Eselon IV

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Prov. Kalsel	BKPSDM Kab Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BKPSDM Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BKPSDM Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kabupaten Tanah	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	BPKAD Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
<p>tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	
<p>Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i>, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi</p>	<p>BPKAD Kab.Tanah Laut</p>
<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BPKAD Kab.Tanah Laut</p>
<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BPKAD Kab.Tanah Laut</p>
<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BPKAD Kab.Tanah Laut</p>
<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BPKAD Kab.Tanah Laut</p>
<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BPKAD Kab.Tanah Laut</p>
<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BPKAD Kab.Tanah Laut</p>
<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BPKAD Kab.Tanah Laut</p>
<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BPKAD Kab.Tanah Laut</p>
<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BPKAD Kab.Tanah Laut</p>

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Pemerintah Kab.Tanah Laut	
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas PemerintahKab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BPKAD Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPPEDA Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas PemerintahKab.Tanah Laut	BAPPEDA Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPPEDA Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPPEDA Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPPEDA Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPPEDA Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPPEDA Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPPEDA Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPPEDA Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPPEDA Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPPEDA Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Hukum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Hukum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Hukum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Hukum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Hukum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang	Bag. Hukum Setda

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
menggangu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Hukum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag.Hukum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag.Hukum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag.Hukum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag.Hukum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag.Hukum Setda Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang dapat menggangu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag.Hukum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag.Hukum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang menggangu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag.Hukum Setda Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag.Hukum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Organisasi Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Organisasi Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Organisasi Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Organisasi Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Biro Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Prov.	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Kalsel	
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang	Bag. Umum Setda

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Umum Setda Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Humas Setda Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Humas Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Humas Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Humas Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Humas Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Humas Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Humas Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Humas Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	Bag. Humas Setda Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPEDA Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPEDA Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPEDA Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPEDA Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPEDA Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPEDA Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPEDA Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPEDA Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPEDA Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPEDA Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPEDA Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPEDA Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPEDA Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	BAPEDA Kab.Tanah Laut

<p style="text-align: center;">DASAR PERTIMBANGAN</p>	<p style="text-align: center;">UNIT PENGOLAH</p>
<p style="text-align: center;">6</p>	<p style="text-align: center;">7</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BAPEDA Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BKPSDM Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BKPSDM Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BKPSDM Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BKPSDM Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BKPSDM Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BKPSDM Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BKPSDM Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BKPSDM Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BKPSDM Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BKPSDM Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BKPSDM Kab.Tanah Laut</p>
<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BKPSDM Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BKPSDM Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BKPSDM Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BKPSDM Kab.Tanah Laut</p>

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BKPSDM Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BKPSDM Kab.Tanah Laut</p>
<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BKPSDM Kab.Tanah Laut</p>
<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>BKPSDM Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>DISPUSIP Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>DISPUSIP Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>DISPUSIP Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>DISPUSIP Kab.Tanah Laut</p>
<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>DISPUSIP Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>DISPUSIP Kab.Tanah Laut</p>

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISPUSIP Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISPUSIP Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISPUSIP Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISPUSIP Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>DISKOMINFO Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>DISKOMINFO Kab.Tanah Laut</p>

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>DISKOMINFO Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>DISKOMINFO Kab.Tanah Laut</p>

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>DISKOMINFO Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>DISKOMINFO Kab.Tanah Laut</p>
<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>DISKOMINFO Kab.Tanah Laut</p>
<p>Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut</p>	<p>DISKOMINFO Kab.Tanah Laut</p>

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab.Tanah Laut	DISKOMINFO Kab.Tanah Laut

DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	7
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	Inspektorat Kab.Tanah Laut
Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab.Tanah Laut	Inspektorat Kab.Tanah Laut

Pj.BUPATI TANAH LAUT

ttd.

H. SISWANSYAH